



ABSTRAK

Skripsi ini mempertanyakan mengenai mengapa transformasi perlawanan masyarakat adat di Indonesia menjadi gerakan sosial baru terjadi pasca tahun 1993 dan bukan tahun-tahun sebelumnya. Argumen yang ditawarkan dalam skripsi ini adalah bahwa keempat prasyarat transformasi yang dikonsepkan oleh Sidney G. Tarrow baru dapat terpenuhi dan merespon satu sama lain dalam sebuah mekanisme pasca tahun 1993. Repertoar perlawanan pasca tahun 1993 berubah dari tradisional menjadi modern dan lebih strategi. Jaringan masyarakat adat pasca tahun 1993 tidak lagi terbatas dalam level lokal dalam daerah namun juga antar komunitas adat di seluruh Indonesia, antar institusi/lembaga berbagai bidang, hingga bahkan ke luar negeri. Dari sisi *framing*, masyarakat adat yang tadinya tidak terlibat aktif dalam kontestasi *framing* isu masyarakat adat akhirnya secara aktif mampu menentukan identitas mereka, memetakan posisi mereka terhadap pihak-pihak luar, serta mampu memaknai gambaran yang lebih luas mengenai politik perlawanan terkait masyarakat adat sebelum dan setelah reformasi. Perlawanan masyarakat adat pasca tahun 1993 juga disambut dengan adanya reformasi yang mampu menjadikan usaha diam-diam masyarakat adat dalam politik perlawanan ini menjadi lebih masif dan naik ke permukaan karena terbukanya peluang politik yang sebelumnya nyaris tidak ada di bawah rezim otoriter Orde Baru. Perubahan dalam keempat prasyarat di atas kemudian bukan saja bekerja sendiri-sendiri melainkan saling merespon satu sama lain sehingga menjadikan perlawanan politik masyarakat adat di Indonesia mampu bertransformasi menjadi sebuah gerakan sosial di level nasional yang berkelanjutan.

Kata kunci: *perlawanan, transformasi gerakan sosial, masyarakat adat, repertoar perlawanan, jaringan gerakan, framing, peluang politik*



ABSTRACT

This thesis analyses the causes behind why the transformation of indigenous peoples' contention in Indonesia into a social movement took place post-1993 and not in the previous years. The argument offered by this thesis is that it was only after 1993 that the four transformation prerequisites by Sidney G. Tarrow can only be fulfilled and respond to each other in a certain mechanism. The repertoire of contention post-1993 changed from traditional to modern and strategic. The Indigenous peoples' networks post-1993 were no longer limited at the local level but also between indigenous communities throughout Indonesia, among diverse institutions in various fields, and even abroad. The Indonesian indigenous peoples began to actively participate in the framing contestation in the field of indigenous peoples' issues only after 1993 and the post-1993 contention was welcomed by a significant political opportunity when reformation/the fall of the New Order regime happened in 1998. The four changes in each field of the prerequisites above then worked together and made it possible for the Indonesian indigenous peoples' contention to transform to a sustainable social movement in the national scale.

Keywords: contention, social movement transformation, indigenous peoples, repertoire of contention, movement networks, framing, political opportunity